

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persepsi *China Threat* menjadi perbincangan pada awal 1990-an ketika media dan para teoritis Amerika Serikat menganggap Tiongkok mengganggu stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik.¹ Persepsi ini menjadi sorotan ketika Tiongkok melakukan percobaan misil di sekitar selat Taiwan pada tahun 1995 dan 1996 yang berujung pada dua pengiriman pesawat pengangkut Amerika Serikat ke wilayah tersebut. Pasalnya hubungan antara Amerika Serikat dan Taiwan menjadi salah satu sumber ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat.² Merespon percobaan misil tersebut, juru bicara Gedung Putih, James Fatig, mengatakan bahwa Amerika Serikat sangat terganggu dengan tindakan provokatif tersebut.³ Sejak saat itu citra *China Threat* menjadi perbincangan dalam hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Persepsi *China Threat* mengindikasikan tiga bentuk ancaman Tiongkok bagi Amerika Serikat yaitu ancaman dari segi militer, ekonomi, politik dan ideologi.⁴

Kecemasan Amerika Serikat terhadap militer Tiongkok tidak hanya pada sikap agresif di Selat Taiwan tapi juga dari intensitas modernisasi militer

¹ Jean- Pierre Cabestan, Herbert Yee dan Ian Storey (dkk), "*The China Threat : Perceptions, Myths and Reality*", RoutledgeCurzon., 2002, <http://chinaperspectives.revues.org/421> (diakses pada tanggal 3 Desember 2018).

² Jean – Marc F Blanchard, *A Primer on China – US Relations, 1949 – 2008 : Conflict and Cooperation in Sino – US Relations*, (New York: Routledge, 2015).

³ Patrick E. Tyler, "China Signaling U.S That it Will Not Invade Taiwan," *The New York Times*, 13 Maret 1996, <https://www.nytimes.com/1996/03/13/world/china-signaling-us-that-it-will-not-invade-taiwan.html> (Diakses pada tanggal 5 Desember 2018).

⁴ Emma V. Broomfield, "Perception of Danger: The China Threat Theory," *Journal of Contemporary China* Vol.12, No. 35, (2003): Hal 279.

Tiongkok. Karl Eikenberry dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat mencatat bahwa anggaran militer Tiongkok naik 140% dari tahun 1988 sampai 1995.⁵ Kecemasan ini berlanjut dengan dikeluarkannya *National Defense Authorization Act (NDAA)* oleh Amerika Serikat yang berisi penangguhan hubungan kerjasama militer antara kedua negara. Kecurigaan Amerika Serikat berlanjut dengan keluarnya laporan “*Cox Report*” tahun 1999 oleh kongres Amerika Serikat yang berisi tentang tuduhan tentang spionase yang dilakukan oleh Tiongkok. Selain itu beberapa media Amerika Serikat juga memberitakan bahwa Tiongkok melakukan perdagangan senjata kepada negara – negara yang menjadi musuh Amerika Serikat.⁶

Secara pemerintahan, Amerika Serikat sangat berbeda dengan Tiongkok. Amerika Serikat adalah negara dengan sistem kapitalis yang berlandaskan pada ideologi liberal dan menekankan pada hak individu. Berbeda dengan Tiongkok yang menerapkan sistem sosialis dan latar belakang ideologi komunis dimana hak individu relatif.⁷ Amerika Serikat juga negara yang menghargai HAM. Hal ini terlihat dengan tercantumnya *Bill of Rights* (Piagam Hak Asasi Manusia) dalam konstitusi Amerika Serikat. Masih berdirinya Tiongkok sebagai negara dengan sistem ideologi komunis terkuat yang masih ada sekarang, membuat Tiongkok dilihat oleh Amerika Serikat sebagai kompetitor ideologi.⁸

Kepedulian Amerika Serikat terhadap isu HAM terlihat pada insiden penembakan demonstrasi pelajar di alun – alun Tiananmen tahun 1989 yang

⁵ Emma V. Broomfield. Hal 279

⁶ Emma V. Broomfield. Hal 280

⁷ Phatak O, “Communism VS Capitalism,” <http://www.buzzle.com/articles/communism-vs-capitalism.html> (diakses pada tanggal 12 Desember 2018).

⁸ Emma V. Broomfield hal 278

membuat Amerika Serikat mengambil tindakan keras kepada Tiongkok. Pada masa Presiden Bill Clinton tahun 1993, pihak Amerika Serikat mendesak Tiongkok untuk menyelesaikan masalah HAM dengan mengancam penghapusan status *Most Favored Nations (MFN)*. Walaupun begitu, pada tahun 1994, Pemerintahan Amerika membatalkan rencana tersebut dan memisahkan masalah HAM dan MFN.⁹ *Most Favored Nation* adalah status istimewa yang diberikan oleh Amerika Serikat pada Tiongkok pada 24 Januari 1980. Dengan adanya status ini Tiongkok dibebaskan dari tarif dagang yang tinggi kepada Amerika Serikat. Dalam laporan kongres tahunan Amerika Serikat disebutkan bahwa membentuk Tiongkok yang lebih demokratis adalah tujuan jangka panjang Amerika Serikat. Peningkatan ekonomi dan militer Tiongkok akan berimplikasi serius pada keamanan nasional Amerika Serikat.¹⁰

Kebangkitan Tiongkok sebagai raksasa ekonomi di tahun 1990-an juga dikhawatirkan oleh publik Amerika Serikat.¹¹ Sejak beralihnya kebijakan ekonomi yang lebih pro-pasar telah membuat perekonomian Tiongkok meningkat drastis dengan rata – rata pertumbuhan 9,7% dari tahun 1979 -1995.¹² Hal ini juga berdampak pada perdagangan Amerika Serikat ke Tiongkok yang mengalami defisit. Ketika ekspor Amerika Serikat kepada Tiongkok meningkat rata – rata 4% pertahunnya, impor Amerika Serikat terhadap produk Tiongkok meningkat

⁹ Dong Wang, “US –China Trade, 1971 -2012: Insight into the U.S – China Relationship,” *The Asia – Pacific Journal* Vol.11, No. 24, (2013), <https://apjif.org/2013/11/24/Dong-Wang/3958/article.html> (Diakses pada tanggal 3 Desember 2018).

¹⁰ Report To Congress of the U.S – China Security Review Commission. *The National Implications of The Economic Relationship Between the United States and China*. Washington DC. (2002)

¹¹ Emma V. Broomfield hal 279

¹² Marcus Noland, “US – China Economic Relations. Institute for International Economics,” Working Paper,” 1996, <https://piie.com/publications/working-papers/us-china-economic-relations> (diakses pada tanggal 3 Desember 2018).

32% pertahunnya. Pada tahun 1995, neraca perdagangan Amerika Serikat mengalami defisit US\$ 34 miliar. Selain itu, Amerika Serikat juga menuntut Tiongkok karena melakukan praktek perdagangan yang tidak sehat seperti *dumping*, pembajakan dan pelanggaran hak cipta.¹³ Dalam laporan *The U.S Trade Deficit Review Commission* pada tahun 2000 menyebutkan bahwa jumlah PHK di Amerika Serikat meningkat sebanyak 760.000 karyawan yang disebabkan oleh perdagangan Tiongkok ke Amerika Serikat.¹⁴

Namun disisi lain, peningkatan ekonomi tersebut juga tidak lepas dari peran Amerika Serikat sebagai pasar ekspor terbesar Tiongkok. Hal ini disebabkan oleh barang impor dari Tiongkok yang terbilang lebih murah. Pada pertengahan tahun 1980 Amerika Serikat merupakan mitra dagang Tiongkok terbesar setelah Uni Eropa dan Hongkong.¹⁵ Tahun 2005, Amerika Serikat menjadi mitra dagang nomor dua terbesar setelah Uni Eropa dengan total perdagangan US\$ 211,6 miliar.¹⁶ Amerika Serikat juga merupakan sumber investasi asing nomor lima dari Tiongkok. Tercatat 4,5 % dari total investasi asing Tiongkok dari tahun 1979 – 2016 berasal dari Amerika Serikat.¹⁷ Dengan tingginya tingkat perdagangan Tiongkok dengan Amerika Serikat, maka penting bagi Tiongkok untuk menampilkan citra positif terhadap Amerika Serikat.

¹³ Thomas Klitgaard and Karen Shiele, "The Growing U.S Trade Imbalance with China," *Current Issues in Economic and Finance* Vol. 3 No. 7 (New York:1993): hal 5.

¹⁴ U.S Trade Deficit Review Commission. *Impact of U.S – China Trade Relations on Workers, Wage, and Employment*. (2001)

¹⁵ Dong Wang, "US –China Trade".

¹⁶ Thomas Lum, "China Trade with United States and the World," *Congressional Research Service report* RL31403,(2007): hal 6.

¹⁷ Wayne M. Morrison, "China's Economic Rise: History, Trends, Challenge, and Implications for the United States," *Congressional Research Service Report*, (2018): Hal 15.

Untuk kembali membangun citra, Tiongkok menerapkan kebijakan *Peaceful Rise* pada masa pemerintah Hu Jintao tahun 2003.¹⁸ Konsep *Peaceful Rise* yang pertama kali dibentuk oleh Zheng Bijian dan diadopsi oleh Tiongkok sebagai prinsip kebijakan luar negeri. Konsep *Peaceful Rise* menjelaskan bahwa kemajuan ekonomi, militer dan teknologi Tiongkok ditujukan untuk tujuan damai. Terminologi *Peaceful rise* juga disampaikan oleh Perdana Menteri Tiongkok, Wen Jiabao tahun 2003 di Universitas Harvard, Amerika Serikat. Konsep *Peaceful Rise* sendiri sebelum diadopsi oleh prinsip kebijakan luar negeri, pemerintah Tiongkok mengubah sedikit redaksional katanya menjadi *peaceful development* untuk menghindari arti yang provokatif.¹⁹

Dalam *White Paper Peaceful Development Road* disebutkan bahwa dalam mengembangkan perekonomian, Tiongkok membutuhkan lingkungan yang damai dan stabil. Untuk mewujudkan hal tersebut *peaceful development* bertujuan untuk membangun *Harmonious World* atau dunia yang harmoni.²⁰ Dalam pidatonya pada pertemuan PBB ke 60 tahun 2005, Hu Jintao menyebutkan ada empat poin penting yang diperlukan untuk membangun dunia yang harmoni.²¹ Pertama, konsep keamanan yang dilandasi rasa kepercayaan dan persamaan; kedua, keaktifan PBB dalam mewujudkan kemakmuran semua negara; ketiga, rasa saling menghargai terhadap sistem sosial yang berbeda dari setiap negara dengan memperkuat dialog dan pertukaran budaya di antara bangsa; keempat, upaya dari

¹⁸ Zheng Bijian, *China's Peaceful Rise" To Great- Power Status*, Foreign Affairs, (2005): hal 15.

¹⁹ Rosita Dellios and R. James Ferguson, *"China's Quest for Global Order"*. Lexington Books. Lanham. (2013) hal 67

²⁰ White Paper China Peaceful Development Road. <http://www.china.org.cn/english/features/book/152684.htm> (Diakses pada tanggal 4 Desember 2018)

²¹ Permanent Mission of the People's Republic of China to UN. Hu Jintao Delivers an Important Speech at the UN Summit <https://www.fmprc.gov.cn/ce/ceun/eng/zt/shnh60/t212614.htm> (Diakses pada tanggal 4 Desember 2018)

setiap negara mengawal dan mengembangkan PBB menjadi organisasi yang efisien. Dalam upaya membangun *Harmonious World*, Tiongkok menggunakan promosi budaya sebagai salah satu instrumen perubahan persepsi masyarakat internasional. Du Ruiqing, Mantan Presiden dari *Xi'an International Studies*, dalam konferensi Akademisi Amerika Serikat – Tiongkok mengatakan bahwa Tiongkok sedang berupaya dalam menghilangkan persepsi “*China Threat*” dan untuk mengatasi hal tersebut budaya merupakan instrumen yang efektif.²²

Pada Desember 2005, Sekretaris Kenegaraan Amerika Serikat, Robert Zoellick, dalam pertemuan diplomatik kedua negara mengatakan bahwa Tiongkok harus menjadi “*responsible stakeholder*” tidak hanya dalam bidang diplomasi ekonomi tapi politik. Zoellick juga mengatakan Amerika Serikat siap bekerja sama dengan Tiongkok yang non-demokratis. Pada tahun 2004 pemerintah Tiongkok mendirikan institusi penyebaran budaya dan bahasa Tiongkok yang bernama *Confucius Institute (CI)*. Institusi ini pertama kali didirikan di Seoul dan disusul di Universitas Maryland, Amerika Serikat. Institusi ini berkembang dengan cepat, tercatat ada 400 *CI* yang telah didirikan di 108 negara dengan mayoritas berada di Amerika Serikat.²³ Pada 2009 Presiden Barack Obama juga mengumumkan akan meluncurkan program 100000 *strong China* untuk mendorong pelajar Amerika Serikat untuk belajar di Tiongkok. Hal ini ditujukan agar pelajar Amerika Serikat lebih memahami dunia lebih luas dan melatih

²² Xinhua. China promotes its culture overseas to dissolve “China Threat” http://en.people.cn/200605/28/eng20060528_269209.html (Diakses pada tanggal 4 Desember 2018)

²³ Joe Tin Yau Lo, Suyan Pan. *Confucius Institute and China's Soft Power: Practices and Paradoxes. Compare: A Journal of Comparative and International Education. Vol,46 No. 4* Hongkong. (2014) hal 514

kemampuan adaptasi budaya.²⁴ Menurut *Survey Gallup* indeks kesukaan masyarakat Amerika Serikat kepada Tiongkok meningkat di kisaran 41 % pada tahun 2012 yang sebelumnya hanya 33% pada tahun 1997.²⁵ Survey tersebut memiliki indikator seperti pandangan tentang ancaman militer dan ekonomi Tiongkok ke Amerika Serikat.

1.2 Rumusan Masalah

Kebangkitan ekonomi, militer, dan politik Tiongkok menimbulkan anggapan bahwa Tiongkok merupakan ancaman "*China Threat*" bagi Amerika Serikat. Selain itu isu pelanggaran HAM yang terjadi di Tiongkok menjadi citra buruk di Amerika Serikat. Untuk menghilangkan persepsi tersebut, Hu Jintao memformulasikan konsep *Peaceful Rise* sebagai landasan kebijakan luar negerinya. Konsep ini dibentuk sebagai jawaban dari keresahan masyarakat internasional tentang persepsi *China Threat*. Dalam *White Paper Peaceful Development Road*, Tiongkok menetapkan bahwa tujuan dari Tiongkok adalah pembentukan *Harmonious World* atau dunia yang harmoni. Untuk mengwujudkan hal tersebut Tiongkok menekankan budaya sebagai salah satu alat diplomasi. Data survei menunjukkan bahwa citra Tiongkok di Amerika Serikat mulai membaik pada tahun 2012 dengan *favourable index* 41 % yang sebelumnya pada tahun 1997 hanya 33 % . Berdasarkan fakta tersebut menarik untuk diteliti tentang diplomasi publik Tiongkok dalam mengubah persepsi "*China Threat*" terhadap Amerika Serikat.

²⁴ *100000 Strong Educational Exchange Initiatives*. U.S Department of State. <https://2009-2017.state.gov/100k/> (Diakses pada tanggal 4 Desember 2018)

²⁵ Gallup Survey. *China's U.S Image the Most Positive in Three Decades*. <https://news.gallup.com/poll/204227/china-image-positive-three-decades.aspx>

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, penulis memunculkan pertanyaan penelitian tentang bagaimana upaya diplomasi publik Tiongkok ke Amerika Serikat pada masa Hu Jintao.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya diplomasi publik Tiongkok ke Amerika Serikat pada masa Hu Jintao.

1.5 Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan kajian Ilmu Hubungan Internasional khususnya kajian diplomasi publik sekaligus dapat memperkaya topik kajian Ilmu Hubungan International di bidang diplomasi publik
2. Memberikan gambaran tentang upaya negara dalam menggunakan diplomasi publik dalam proses perbaikan citra.
3. Menambah referensi dan kepustakaan Ilmu Hubungan Internasional dalam bidang kajian diplomasi publik karena dapat dilihat bahwa diplomasi publik merupakan solusi yang efektif dalam proses perbaikan citra.

1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam menganalisis judul yang diangkat peneliti melakukan tinjauan pada beberapa kajian pustaka yang dianggap relevan pada penelitian kali ini. Kajian pustaka yang pertama berjudul "*Building the Russian World: Cultural Diplomacy of the Russian Language and Cultural Identity*" yang ditulis oleh Anna Klyueva

dan Anna Mikhaylova.²⁶ Penelitian ini menggambarkan bagaimana Rusia berupaya untuk menghilangkan citra negatif dengan mempromosikan bahasa dan budaya Rusia kepada dunia. Pemerintahan Rusia melihat diaspora dari warga Rusia yang tersebar paska pecahnya Uni Soviet bisa menjadi aktor dalam penyebaran budaya. Untuk alasan tersebut pembuat kebijakan Rusia melihat bahwa diplomasi budaya bisa menjadi instrumen *soft power* Rusia dalam mencapai kepentingannya. Kebijakan ini di implementasikan dalam bentuk ide *Russkiy Mir* (Dunia Rusia) yang berisi komunitas bahasa, pembicara dan orang yang tertarik pada Bahasa Rusia. Pada 2007, pemerintah Rusia membuat institusi bahasa *Russkiy Mir Foundation* yang bertujuan untuk mengajarkan bahasa dan budaya Rusia di luar negeri. Dalam tulisan ini disebutkan bahwa *Russkiy Mir Foundation* juga membantu dalam penguatan komunitas dan pengenalan budaya nasional kepada diaspora warga Rusia yang ada di Amerika Serikat. Kontribusi tulisan ini pada penelitian ini adalah dengan memberi penjelasan tentang bahasa dan budaya dapat menjadi instrumen *soft power* dalam mencapai kepentingan suatu negara dan dalam kasus ini Rusia. Berbeda dengan penelitian ini yang meneliti upaya diplomasi publik yang dilakukan Tiongkok ke Amerika Serikat

Kajian pustaka yang kedua ditulis oleh Michal Marcin Kobierecki dengan judul “ *Ping – Pong Diplomacy and its Legacy in the American Foreign Policy*”.²⁷ Tulisan ini menggambarkan bagaimana olahraga tenis meja dapat menjadi sarana diplomasi Tiongkok dan Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Selama masa awal perang dingin hubungan Amerika Serikat dengan negara –

²⁶ Anna Klyueva dan Anna Mikhaylova, Building the Russian World : Cultural Diplomacy of the Russian Language and Cultural Identity, *JOMEC Journal*. Vol 11. (2017) hal 127 -143

²⁷ Michal Marcin Kobierecki, Ping Pong Diplomacy and its Legacy in the American Foreign Policy, *Polish Political Science Yearbook*, Vol. 45. (2016) hal 304 - 316

negara komunis tidak berjalan baik. Namun Amerika Serikat berhasil menjalin hubungan dengan Tiongkok diplomasi rahasia walaupun terbatas namun Tiongkok menunjukkan ada keinginan untuk bekerjasama kepada Amerika Serikat. Pada kejuaraan dunia tenis meja di Nagoya pada tahun 1971 salah satu atlet Tiongkok dilaporkan Zhuang Zedong melakukan kontak dan bertukar hadiah kepada atlet Amerika Serikat Glen Cowan. Pada saat itu aturan olahraga sangat kental dengan campur tangan pemerintah. melihat hal tersebut Tiongkok melakukan undangan resmi untuk melakukan pertandingan persahabatan kepada tim tenis meja Amerika Serikat pada 6 April 1971. Hal tersebut merupakan pertama kalinya delegasi Amerika Serikat melakukan hubungan diplomasi kembali dengan Tiongkok setelah tahun 1949. Setelah pertandingan tersebut hubungan diplomatis Amerika Serikat dan Tiongkok mulai pulih. Hal ini terlihat ketika pemerintahan Amerika Serikat mencabut embargo yang diajukan kepada Tiongkok selama 22 tahun sebelumnya. Tulisan berkontribusi dalam menjelaskan bagaimana olahraga dulunya pernah menjadi instrumen diplomasi yang efektif membangun hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada upaya diplomasi publik Tiongkok ke Amerika Serikat pada era Hu Jintao.

Kajian pustaka yang ketiga berjudul “*Exporting National Culture: Histories of Cultural Institute Abroad*” yang ditulis oleh Gregory Paschalidis.²⁸ Dalam penelitian ini Paschalidis menjelaskan perkembangan institusi budaya berdasarkan kepentingan dari setiap negara Eropa. Paschalidis mencontohkan keberhasilan institusi budaya Francis dalam membangun hubungan dengan

²⁸Gregory Paschalidis, *Exporting National Culture : Historis of Cultural Institute Abroad*, *International Journal of Cultural Policy*, Vol.15,No.03. (2009) hal 275 - 289

Amerika Serikat, membangun kerjasama ekonomi dengan Jepang, meningkatkan ekspor budaya Prancis, dan membuat Paris terlihat sebagai destinasi wisata budaya internasional. Paschalidis menjelaskan 4 fase perkembangan dari institusi budaya. yang pertama fase budaya nasionalisme 1870 – 1914 yang diawali oleh penyebaran bahasa dan budaya oleh Jerman, Italia dan Prancis di daerah koloni atau digunakan sebagai alat memperkuat nasionalisme dari negara tersebut. Fase yang kedua yaitu propaganda budaya (1914 – 1945) pada masa ini institusi budaya digunakan sebagai alat propaganda untuk mencari dukungan karena perang dunia I dan perang dunia II. Pada masa Inggris juga membentuk institusi budaya *British Council* sebagai pembendung propaganda negara Eropa lain. Institusi budaya pada masa ini juga berkembang dengan menyertakan pertunjukan budaya kepada masyarakat. Fase ketiga diplomasi budaya 1945 – 1989. Jerman yang memiliki citra buruk paska perang dunia II juga mulai membentuk *Goethe Institute* sebagai instrumen diplomasi untuk memperbaiki kembali citranya. Pada masa ini institusi budaya diwarnai dengan persaingan diplomasi budaya blok Timur dan Barat. Fase keempat imperialisme budaya dari tahun 1989 – sekarang. Kerjasama EUNIC pada 2006 yang berisikan kerjasama seluruh institusi budaya yang ada di Uni Eropa yang bertujuan menumbuhkan pemahaman budaya di luar dan didalam Uni Eropa. Penelitian ini berkontribusi terhadap penulis tentang bagaimana perkembangan institusi budaya dan kepentingan yang dituju. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada kajian historis perkembangan institusi budaya sedangkan penelitian penulis membahas diplomasi publik Tiongkok pada era Hu Jintao ke Amerika Serikat.

Kajian pustaka yang keempat yaitu penelitian yang berjudul “*Bridging the Theoretical Gap Between Public Diplomacy and Cultural Diplomacy*” yang ditulis oleh Hwajung Kim.²⁹ Penelitian mencoba melihat bagaimana hubungan antara diplomasi publik dan diplomasi budaya. Kim melihat pradigma diplomasi publik telah berubah arah sejak terbentuknya konsep *soft power* yang dikatakan Nye. Diplomasi publik yang baru menekankan nilai, budaya, kebijakan, institusi dan termasuk di dalamnya *hard power*. Elemen – elemen dari diplomasi publik tersebut ditujukan untuk meningkatkan *soft power* dari negara. Ada perdebatan antara konsep diplomasi budaya dan diplomasi publik, ada kelompok ahli yang mengatakan bahwa diplomasi budaya adalah bagian dari diplomasi publik, ahli lainnya mengatakan diplomasi publik dan diplomasi budaya adalah sesuatu yang berbeda. Kesamaan dari kedua pendekatan tersebut ialah keduanya ditujukan untuk memupuk *soft power* dan memberikan pemahaman yang sama dan membentuk citra positif. Dalam sejarah perkembangannya diplomasi budaya sangat erat kaitannya dengan aktivitas yang dibentuk oleh pemerintah seperti institusi budaya dan diaspora dari masyarakat. Kim juga mengatakan bahwa diplomasi budaya baru di definisikan sebagai aktor budaya yang mencoba memberikan pemahaman budaya melalui hubungan budaya internasional dengan prantara pemerintah untuk memperkuat kredibilitas, kepercayaan serta nilai normatif. Kim menyimpulkan bahwa diplomasi budaya berada di antara diplomasi publik dan hubungan budaya internasional. Penelitian ini berkontribusi memberikan pemahaman tentang hubungan diplomasi budaya dan diplomasi

²⁹ Hwajung Kim, *Bridging the Theoretical Gap Between Public Diplomacy and Cultural Diplomacy*, *Korean Journal of International Studies*, Vol.15, No.2, (2017) hal 293 - 326

publik. Berbeda dengan penelitian penulis buat yang menekankan konsep diplomasi publik.

Kajian pustaka kelima yaitu tulisan Yi Edward Yang dan Xiensheng Liu “*The ‘China Threat’ Through Lens of US Print Media: 1992 – 2006*” Tulisan ini menjelaskan tentang seberapa sering media Amerika Serikat menerbitkan isu *China Threat* pada tahun 1992 – 2006 . Dalam penelitian ini ditemukan bahwa media Amerika Serikat mulai sering dalam memberitakan tentang isu *China Threat* dari tahun 1990 an, baik dari segi militer, politik dan ekonomi. Data yang diambil dari lima koran ternama di Amerika Serikat (*New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Wall Street Journal dan Chicago Tribune*) menunjukkan dari tahun 1992 – 2006 ada 376 artikel yang berkaitan dengan *China Threat* . Kategori isu *China Threat* selalu berganti – ganti tergantung kebijakan yang sedang difokuskan oleh Amerika Serikat. Seperti pada tahun 1992 – 2002, pemberitaan *China Threat* mayoritas dari militer dan politik dan ditahun 2002 – 2006 mayoritas pemberitaan mengenai ancaman ekonomi Tiongkok. Walaupun pemberitaan tentang *China Threat* tetap ada setiap tahunnya namun intensitas pemberitaan juga mengalami penurunan dari tahun 1992 – 2006.³⁰ Tulisan ini berkontribusi pada penulis sebagai refleksi pandangan media Amerika Serikat memandang Tiongkok sebagai ancaman. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas upaya Tiongkok dalam mengilangkan persepsi *China Threat* di Amerika Serikat.

³⁰ Yi Edward Yang and Xiensheng Liu, *The ‘China Threat’ Through the Lens of US Print Media: 1992 – 2006*, *Journal of Contemporary China*. Vol.21, No.76. (2012) hal 695 - 711

Dari beberapa tulisan yang dijadikan tinjauan pustaka, terdapat perbedaan yang telah dijelaskan dengan penelitian ini. Meskipun demikian, kelima tulisan tersebut tidak langsung menjawab pertanyaan yang diangkat pada penelitian ini. Oleh sebab itu, pada penelitian ini peneliti lebih berfokus kepada upaya Tiongkok dalam menghilangkan persepsi negatif di Amerika Serikat menggunakan pendekatan diplomasi publik.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Diplomasi Publik

Konsep diplomasi publik pertama kali dikeluarkan oleh Edmund Gullion pada tahun 1965. Gullion mendefinisikan diplomasi publik sebagai kebijakan luar negeri yang ditujukan untuk mempengaruhi sikap publik. Diplomasi publik meliputi dimensi hubungan internasional; merubah pendapat publik di negara lain; interaksi antar kelompok satu negara dengan negara lain; komunikasi antar diplomat, koresponden asing dan proses komunikasi antar budaya.³¹ Konsep diplomasi publik juga didefinisikan Jan Melissen sebagai usaha untuk mempengaruhi orang atau organisasi lain di luar negaranya dengan cara positif sehingga mengubah cara pandang orang tersebut terhadap suatu negara.³²

Dalam perkembangannya diplomasi publik sendiri tidak lepas dari usaha negara untuk mengejar *soft power*. Nye menjelaskan bahwa diplomasi publik

³¹ Nicholas J.Cull. "Public Diplomacy Before Gullion: The Evolution a Phrase", In Nancy Snow (ed) and Philip M. Taylor, "Handbook of Public Diplomacy" ,Routledge, New York: (2009) hal 19

³²Jan Melissen, "Public Diplomacy Between Theory and Practice". In J. Noya (ed). *The Present and Future of Future of Public Diplomacy: A European Perspective*. RAND Corporation. California: 2006 hal 43

adalah instrumen untuk meningkatkan *soft power* dari suatu negara.³³ Konsep dari *soft power* sendiri dijelaskan oleh Nye sebagai kemampuan suatu negara untuk mencapai tujuannya dengan lebih mengutamakan daya tarik (*attraction*) dari pada paksaan (*coercion*) dan pembayaran (*payment*).³⁴ Terdapat tiga sumber dari *soft power* itu sendiri pertama, budaya (dalam ranah yang membuatnya menarik kepada yang lain), kedua, nilai politik (ketika nilai digantungkan kepada mereka baik di dalam dan di luar), dan yang ketiga, kebijakan luar negeri (ketika mereka terlihat mempunyai legitimasi dan nilai moral). Nye menambahkan bahwa *soft power* sangat penting dalam mempengaruhi tingkah laku dan persepsi negara lain.³⁵

R.S Zaharna juga berpandangan bahwa budaya bisa memainkan peran positif dalam mempererat hubungan dan komunikasi antar bangsa dan masyarakat.³⁶ Ketika suatu diplomasi publik gagal atau berdampak terbalik, alasannya mungkin terletak pada budaya. Dalam diplomasi publik budaya cenderung tersembunyi dalam faktor politik, ekonomi dan birokrasi. Lebih jelas lagi, Zaharna menjelaskan beberapa tingkatan terkait upaya membangun hubungan melalui diplomasi publik. Adapun tingkatannya sebagai berikut:³⁷

³³ Joseph S. Nye, Jr. "*Soft Power: The Means to Success in World Politics*". Public Affairs. New York: (2004) hal 31

³⁴ Ibid hal 2

³⁵ Ibid 4

³⁶ R.S Zaharna. "*The Cultural Awakening in Public Diplomacy*". Figueroa Press. Los Angeles: 2012 hal 9

³⁷ R.S Zaharna. "*Mapping Out a Spectrum of Public Diplomacy Initiatives : Information and Relational Communication Frameworks*" in In Nancy Snow (ed) and Philip M. Taylor (ed), "*Handbook of Public Diplomacy*" ,Routledge, New York: (2009) hal 93 - 96

1. *First Tier Relationship – Building Initiatives: Exchange Programs and Visits*

Tingkatan pertama adalah yang paling dasar karena masih memakai pendekatan diplomasi publik tradisional dan aktor yang menjadi target adalah individu. Kesuksesan dari inisiatif ini kebanyakan terletak pada kepribadian dari partisipan. Praktik dari tingkatan ini melalui program pertukaran budaya maupun pendidikan. Praktek ini menjadi penting bagi suatu negara dalam membentuk suatu citra. Setiap negara memiliki tujuan untuk membentuk hubungan dengan masyarakat negara lain. Untuk membangun hubungan tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan pemahaman antara dua nilai dan pemikiran yang berbeda. Upaya dapat dilakukan negara dengan mengirimkan partisipannya ke negara tujuan dan negara tujuan juga dapat melakukan sebaliknya agar terbentuk pemahaman yang sama.

2. *Second Tier Relationship – Building Initiatives*

Tingkatan kedua memperlihatkan adanya peningkatan dalam level partisipan, jangka waktu, koordinasi kemitraan, dan kemampuan diplomasi publik. Dalam level ini target aktor tidak lagi individu tapi lebih menekankan pada grup sosial seperti institusi, komunitas dan masyarakat. Rentangan waktunya lebih fleksibel untuk mendukung perkembangan dan kelanjutan suatu hubungan. Ada perbedaan mendasar tingkat kedua dan tingkat pertama terkait koordinasi kemitraan antara entitas politik yang melakukan diplomasi publik dengan pihak asing sebagai sasarannya terutama baik dalam bidang perencanaan, perancangan dan implementasi. Keuntungan dari inisiatif tingkatan ini tidak hanya masyarakat

dapat ikut dalam suatu diplomasi publik tapi masyarakat juga memberikan umpan balik berupa pengetahuan budaya tentang masyarakat lokal agar program tersebut lebih sukses. Pada level ini, diplomasi publik dapat lebih ditingkatkan melalui jaringan komunikasi antar partisipan, koordinasi langsung, mempertahankan kontak positif dengan partisipan serta berusaha untuk mengembangkan lebih hubungan tersebut. Beberapa bentuk dari inisiatif tingkatan ini adalah:

a. Institusi budaya dan bahasa

Institusi budaya dan bahasa adalah bentuk yang erat kaitannya dengan diplomasi publik. Institusi budaya sendiri adalah lembaga yang ditujukan untuk menyebarkan budaya dan bahasa nasional di negara asing dengan tujuan untuk membangun pemahaman yang sama. Institusi budaya tertua, Alliance Francaise, yang dibentuk pada tahun 1883 sekarang telah memiliki lebih dari 1.000 institusi di 135 negara dan contoh institusi lainnya adalah *British Council* yang pada tahun 1934 bernama *British Committee for Relations with Other Countries* (Lemabaga Inggris untuk hubungan antar negara). Joseph Nye melihat budaya adalah bagian penting dalam sumber *soft power* yang bisa digunakan negara sebagai daya tarik. Institusi ini juga berperan dalam membangun hubungan. Institusi juga berperan sebagai medium untuk berkomunikasi dengan publik, mempermudah koordinasi antara pihak terkait, membuka akses untuk membentuk hubungan dan komitmen, dan menyediakan wadah untuk pembangunan hubungan dan jaringan yang melebihi level individu.

b. Proyek bantuan pembangunan

Membangun hubungan juga dapat dilakukan melalui proyek – proyek pembangunan. Dalam inisiatif ini terdapat dua dimensi yaitu pertama, dimensi bantuan simbolis dimana bantuan atau program hanya ditujukan untuk memperlihatkan ikatan antara pihak bersangkutan. Kedua, hubungan yang aktual yang berkembang antara pihak satu dengan pihak lainnya seperti kerjasama jangka panjang dalam suatu proyek. Seperti contoh Jepang yang membangun *Egyptian – Japanese Friendship Bridge* pada 2001 dimana Jepang mengatakan bahwa pertemanan dapat diperdalam melalui kerjasama kemitraan dengan Mesir.

c. Pengaturan *Twin City* atau *Sister City*

Inisiatif ini merupakan strategi untuk membangun hubungan dengan cara pembentukan kerjasama antar kota dengan kota lain atau provinsi satu dengan provinsi di negara lain. Kerjasama ini dapat juga disebut sebagai “*Sister City*”. Kerjasama ini dapat membantu dalam hal kemitraan dan pertukaran terkait bidang ekonomi, perdagangan, pariwisata, pendidikan, teknologi, olahraga dan yang paling utama membantu komunikasi lintas budaya serta pemahaman tentang pentingnya membangun hubungan. Contoh pengaturan ini yaitu, *sister city* antara Arab Saudi dan Spanyol yaitu kota Abu Dhabi dengan Madrid dengan membawa “rasa Spanyol” ke negara di Semenanjung Arab.

d. Mengampanyekan pembangunan hubungan

Mirip dengan upaya menginformasikan sebuah pesan, mengampanyekan hubungan bisa telah mempunyai tujuan, rentangan waktu, spesifikasi publik, dan keseluruhan kerangka pembentukan kampanye mulai dari penelitian, perencanaan,

implementasi, dan evaluasi terkait kampanye itu sendiri. Hal tersebut termasuk didalamnya pengupayaan pembentukan sponsor di negara lain dan secara aktif berkordinasi dalam perancangan dan implementasinya. Efektivitas kampanye ini dapat diukur dengan tepat berdasarkan kuatnya hubungan tersebut serta pengembang luasannya. Contoh kampanye ini yaitu “*relationship – building campaign*” yang diinisiasi oleh *British Foreign Commonwealth Office* pada tahun 2003 dan diberi nama *Think UK, China*. Kampanye ini termasuk ke ikut sertaan lebih dari 30 acara antara peneliti, pemahat, dan penulis dari Inggris dan Tiongkok yang berkolaborasi dalam konser publik, pameran, perlombaan, dan forum diskusi. Acara publik ini menjadi sorotan oleh media Tiongkok dan dibuat acara televisi khusus yang berjudul “*U.K – China Challenge*”.

e. Skema jaringan non-politik

Dalam skema jaringan non-politik, pembangunan hubungan antar individu atau institusi terjadi dalam jaringan komunikasi non-politik seperti akademik, kesehatan, lingkungan, atau promosi literatur. Dalam inisiatif ini selain untuk tujuan dari jaringan tersebut dibentuk, jaringan juga menjadi wadah bagi sesama anggota untuk membentuk kerjasama lain di luar jaringan. Sebagai contoh *U.K Science and Innovation Network (SIN)* yang diluncurkan oleh *British FCO* di tahun 2000. Jaringan SIN memiliki anggota yang berasal hampir dari 30 negara. Anggota jaringan SIN selain berperan aktif memonitori perkembangan ilmu pengetahuan, jaringan ini juga membuka kesempatan bagi sesama anggota dari berbeda negara untuk membentuk kerjasama kolaborasi dalam bidang sains di luar jaringan tersebut.

3. *Third Tier Relationship – Building Initiatives: Policy Networking Strategy and Coalition Building*

Tingkatan ketiga pada pembangunan hubungan dalam diplomasi publik terkait strategi jejaring kebijakan dan pembangunan koalisi dengan negara lain serta aktor non-negara untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan. Tingkatan ketiga ini memerlukan komunikasi diplomatik yang sangat intens karena suatu entitas politik mungkin memiliki andil yang lebih besar dalam mengontrol arah dan hasil dari proses hubungan ini, belum lagi taruhan kedaulatan politik yang tinggi. Kemampuan komunikasi diplomatik tingkatan ini memerlukan fasilitas dan koordinasi yang lebih untuk menetapkan, mengawasi, dan meningkatkan komunikasi antar aktor terkait. Penetapan tujuan kebijakan dan mekanisme penyelesaian konflik memerlukan advokasi, negosiasi, dan kemampuan mediasi yang tinggi dan intens karena yang dibicarakan adalah kepentingan nasional. Ringkasan dari tiga tingkatan menurut R.S Zaharna dapat dilihat pada **tabel 1.1**.

Tabel 1.1 Tingkatan diplomasi publik R.S Zaharna

	<i>First tier</i>	<i>Second tier</i>	<i>Third tier</i>
Target	Individu	1. Komunitas 2. Masyarakat 3. Institusi	1. Pemerintah 2. Stakeholder
Tujuan	Membangun pemahaman	Membangun hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, komunitas dan institusi	Membangun jaringan antar negara dan non-negara
Praktik	Melakukan pertukaran di bidang budaya maupun pendidikan	1. Pembentukan institusi budaya 2. Bantuan pembangunan 3. Pembentukan <i>twin city</i> 4. Mengampanyekan pembangunan	Pembentukan kerjasama internasional

		hubungan 5. Skema jaringan non-politik	
--	--	---	--

Sumber: R.S Zaharna, 2009

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metodologi dalam sebuah penelitian digunakan sebagai prosedur bagaimana pengetahuan tentang fenomena yang dapat diperoleh. Metode penelitian juga membantu peneliti untuk melakukan penelitian secara sistematis dan konsisten, sehingga nantinya didapatkan data dan hasil penelitian yang baik seperti yang diharapkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengobservasi perilaku dari objek penelitian sehingga dapat ditemukan pola – pola dari kelompok data yang dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan.³⁸ Dalam penelitian kualitatif peneliti tidak menjadikan data numerik sebagai tumpuan utama dalam penelitian melainkan berfokus pada pola – pola umum terhadap fenomena yang terjadi.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah kegiatan mengolah data spesifik. Fakta – fakta spesifik dikumpulkan lalu digabungkan dan diakhir akan membentuk pola – pola yang memiliki arti. Melalui penelitian deskriptif, Peneliti akan mengumpulkan fakta – fakta spesifik tentang upaya Tiongkok dalam memperbaiki citra terkait *China Threat* dan nantinya akan

³⁸ Cathrine Marchall dan Grethen B. Rossman. "Designing Qualitative Research". Sage Publication. California: (1999) hal 150

menggunakan parameter dari kerangka konsep untuk mengklasifikasikan tindakan Tiongkok dalam tujuan tertentu. Metode ini merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan. Metode ini memanfaatkan literatur perpustakaan sebagai data penelitian.³⁹

1.8.2 Batasan Penelitian

Dibutuhkan suatu batasan dalam penelitian sehingga penelitian ini bisa tepat sasaran. Batasan pada penelitian ini merujuk pada dua hal yaitu batasan rentangan waktu fenomena yang diperlukan dalam penelitian, dan batasan yang menjadi fokus permasalahan penelitian ini. Batasan fokus permasalahan penelitian ini hanya menjelaskan upaya Tiongkok dalam memperbaiki citranya terkait *China Threat* ke Amerika Serikat pada masa Hu Jintao. Hal ini nantinya akan dianalisis dengan konsep diplomasi publik melalui indikator dari konsep tersebut. Sedangkan batasan waktu mulai dari tahun 2002 sampai tahun 2012. Penulis mengambil batasan tahun 2002, karena pada tahun tersebut Hu Jintao menjabat sebagai presiden Tiongkok dan berakhir pada tahun 2012.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis atau variabel dependen merupakan objek kajian yang perilakunya akan dijelaskan, dideskripsikan, dan diramalkan sebagai akibat dari variabel lain.⁴⁰ Unit analisis dari penelitian ini adalah diplomasi publik Tiongkok

³⁹ Mustika Zed, "Metode Penelitian Kepustakaan". Yayasan Obor Nasional : Jakarta. (2004) . hal2-3

⁴⁰ Mohtar Masoed, "Ilmu Hubungan Internasional" : Disiplin dan Metodologi. LP3ES. Jakarta : (1990) hal 110

ke Amerika Serikat. Tiongkok mengupayakan diplomasi publik ke Amerika Serikat dikarenakan Tiongkok tidak ingin memperburuk hubungan bilateralnya dan kebangkitan perekonomian Tiongkok sangat terkait dengan hubungan dagangnya dengan Amerika Serikat.

Variabel yang dapat mempengaruhi perilaku variabel dependen atau unit analisis disebut dengan variabel independen atau unit eksplanasi.⁴¹ Pada penelitian ini unit eksplanasi adalah persepsi buruk Amerika Serikat ke Tiongkok yang disebut sebagai *China threat*.

Tingkat analisis adalah cara untuk mengidentifikasi dan bagaimana cara memperlakukan permasalahan yang sedang diobservasi. Penelitian ini berfokus pada pendeskripsian tindakan – tindakan yang diambil Tiongkok pada masa Hu Jintao dalam menghilangkan citra buruk terkait *China Threat* di Amerika Serikat, sehingga dapat disimpulkan tingkat analisis penelitian ini adalah negara.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data. Peneliti menggunakan sumber data sekunder berupa jurnal, berita, artikel, rekaman pidato, situs resmi pemerintahan, dan dokumen serta publikasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk mengumpulkan data - data yang dikumpulkan dalam penelitian akan digunakan untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang telah dirumuskan, dan yang pada

⁴¹ Ibid hal 110

akhirnya akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan atau keputusan.⁴²

Penelitian ini berlandaskan pada studi kepustakaan untuk menafsirkan data – data yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan.⁴³ Hal ini termasuk sumber sekunder yaitu dokumen yang ditulis melalui hasil penelitian terkait suatu kejadian oleh orang yang tidak mengalami kejadian tersebut secara langsung dengan kejadian atau institusi yang diteliti. Pengumpulan data untuk penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan sumber – sumber informasi berupa data – data yang mendukung dan dianggap relevan.

Keywords (kata kunci) yang digunakan dalam pengumpulan data diantaranya diplomasi publik, Tiongkok, hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok, *China threat*. Data yang berkaitan dengan *keywords* tersebut dapat diakses dari situs resmi pemerintah Tiongkok. Selain itu terdapatnya, data – data sekunder lain yang didapatkan dari buku, jurnal maupun artikel penelitian, situs majalah seperti Xinhua, China Daily, New York Times serta sumber valid lainnya seperti Google Book dan situs jurnal terakreditasi seperti Taylor and Francis maupun ASIST

⁴² Afrizal, “*Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam berbagai Disiplin Ilmu*”. PT. Grafindo Persada. Depok:2014, 129.

⁴³ Mustika Zed, Hal 2- 3

1.8.5 Teknik Analisis dan Pengolahan Data

Menurut Miles dan Huberman dalam melakukan analisis data ada beberapa tahapan. Pertama, dilakukan reduksi data dimana data – data yang telah dikumpulkan dirangkum dan difokuskan sehingga menjadi informasi yang penting. Selanjutnya, dilakukan penyajian data dimana data setengah jadi yang telah didapatkan diubah menjadi bentuk tulisan yang baik serta dengan alur yang jelas. Langkah terakhir adalah kesimpulan dimana telah ditemukan jawaban dari penelitian.⁴⁴

1. Reduksi Data

Pada tahapan ini peneliti mengelompokan data – data yang telah dikumpulkan menjadi beberapa kategori. Pengelompokan yang dilakukan berdasarkan pada kategori diplomasi publik Tiongkok dan hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok. Data – data tersebut diambil sesuai dengan batasan waktu penelitian yang ditetapkan yaitu dari tahun 2002 – 2012. Setelah pengelompokan data dilakukan, peneliti membaca dokumen – dokumen yang berkaitan dengan pembahasan diplomasi publik Tiongkok ke Amerika Serikat di era Hu Jintao.

2. Penyajian data

Setelah membaca dokumen – dokumen yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, peneliti akan mengambil poin – poin penting dari bacaan tersebut dan menuliskannya kembali menggunakan kalimat peneliti tanpa mengubah arti dan ide dari peneliti sebelumnya. Selain itu, peneliti juga

⁴⁴ Miles dan Huberman “ *Analisis data Kualitatif* “, dalam Fachrudin, “*Teknik Analisis Data Kualitatif*”, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.(2013) hal 5

melakukan analisis terhadap bahan bacaan yang telah dikumpulkan. Untuk memulai penelitian, peneliti akan menganalisis arah kebijakan luar negeri dan hubungan Tiongkok ke Amerika Serikat pada masa Hu Jintao dimana hal tersebut memiliki perbedaan dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Dari hal tersebut, peneliti akan menganalisis upaya diplomasi publik Tiongkok ke Amerika Serikat pada era Hu Jintao.

3. Kesimpulan dan verifikasi

Setelah proses penyajian data berupa hasil analisis dan penerapan konsep dalam penelitian, peneliti akan mengambil kesimpulan dan verifikasi untuk memastikan bahwa konsep dan kerangka berfikir yang digunakan peneliti mampu menjawab pertanyaan penelitian.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual dan sistematika penulisan

BAB II : Kepentingan Nasional Tiongkok ke Amerika Serikat Pada Masa Hu Jintao

Bab ini berisikan penjelasan mengenai kepentingan nasional Tiongkok ke Amerika Serikat dan sejarah hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat dari masa pemerintahan sebelum Hu Jintao dan di masa Hu Jintao, serta ketegangan yang muncul dan dampak yang ditimbulkan dari ketegangan tersebut.

BAB III : Diplomasi Publik Tiongkok pada masa Hu Jintao

Bab ini berisi tentang penjelasan diplomasi publik yang dilakukan Tiongkok pada masa Hu Jintao. Pada bab ini juga akan dideskripsikan mengenai landasan, tujuan, dan aktor – aktor yang berperan dalam diplomasi publik yang dilakukan Tiongkok pada masa Hu Jintao.

BAB IV : Analisis Diplomasi Publik Tiongkok ke Amerika Serikat

Bab ini berisi tentang analisis upaya diplomasi publik yang dilakukan Tiongkok ke Amerika Serikat untuk memperbaiki citranya menggunakan pendekatan tingkatan diplomasi publik menurut R.S Zaharna.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan hasil dari penelitian.

